

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Seluma. Berhasilnya penyelenggaraan tugas pengawasan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada sumber daya manusia khususnya PNS. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokrasi, Makmur adil dan bermoral tinggi, diperlukan aparatur yang dapat memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang pengawasan. Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu dibentengi dengan etika yang baik serta diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Tercatat sampai saat ini jumlah sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Seluma sebanyak 143 orang dengan 46 orang bersatatus sebagai PNS, 57 orang berstatus sebagai CPNS, PPPK sebanyak 31 orang dan 9 orang berstatus pegawai honor. Semua SDM tersebut berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang terdiri dari 9 pejabat struktural, 33 orang pejabat fungsional dan 61 orang fungsional umum serta 9 orang non PNS.

Berikut data mengenai sumber daya manusia yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Seluma berdasarkan jabatan, Pendidikan, pangkat dan golongan :

Pegawai Inspektorat Kabupaten Seluma pada tahun 2025 dengan jumlah sebanyak 131 (Seratus Tiga puluh satu) orang dengan Susunan sebagai berikut:

- Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon :

No.	Pangkat/Golongan	Jabatan yang diduduki				Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	1	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	5	-	2	7
	Pembina (IV/a)	-	1	2	6	9
2.	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	1	7	8
	Penata (III/c)	-	-	-	6	6
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	11	11
	Penata Muda (III/a)	-	-	-	5	5
3	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	1	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-
4	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-
	Juru Muda (II/a)	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	6	3	39	48

- Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA/SMK	9	11	20
4	DIPLOMA	6	19	25
5	STRATA 1	32	42	74
6	STRATA 2	3	8	11
7	STRATA 3	1		1
	JUMLAH	51	79	131

o Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural

NO	Jenis Pendidikan Struktural	Jumlah
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	7
3	Diklat PIM IV	4
Total		11

o Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH APFP (Orang)
1	Diklat Auditor	17
2	Diklat P2 UPD	-
3	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional Auditor	-
4	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional P2UPD	-
Total		17

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	Auditor Madya	2

2	Auditor Muda	13
3	Auditor Pertama	1
4	Auditor Terampil	16
5	Auditor Ahli Pertama	15
	JUMLAH	47

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	PPUPD Madya	5
2	PPUPD Muda	5
3	Auditor Pertama	10
	JUMLAH	20

1. Berdasarkan Golongan

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, Inspektorat Kabupaten Seluma didominasi oleh pegawai pada Golongan III yang berjumlah 64 orang. Komposisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat menengah dalam struktur kepangkatan ASN. Pegawai pada golongan ini umumnya sudah memiliki pengalaman kerja yang memadai serta berada pada fase produktif untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap tugas-tugas perencanaan, riset, dan inovasi daerah.

Sementara itu, terdapat 12 orang pegawai pada Golongan IV, yang umumnya menempati posisi lebih senior baik dari sisi masa kerja maupun pengalaman teknis maupun manajerial. Kehadiran pegawai di golongan ini sangat penting dalam memberikan arahan, pembinaan, dan supervisi terhadap pegawai yang berada di bawahnya. Namun jumlah pegawai di golongan ini relatif masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, sehingga menjadi catatan tersendiri untuk ke depan dalam upaya mendorong percepatan karier pegawai potensial agar dapat mencapai jenjang golongan IV.

Di sisi lain, pegawai pada Golongan II berjumlah 22 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekrutan pegawai dengan golongan awal semakin berkurang, yang bisa jadi disebabkan oleh kebijakan rekrutmen ASN yang lebih banyak menerima formasi formasi dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Walaupun

jumlahnya kecil, pegawai di golongan ini tetap memiliki kontribusi, khususnya dalam pekerjaan teknis pendukung. Namun, dengan komposisi yang kecil tersebut, ke depan dibutuhkan strategi pembinaan dan peningkatan kapasitas agar mereka dapat segera naik ke golongan yang lebih tinggi sehingga lebih efektif dalam mendukung tugas kelembagaan.

Secara umum, distribusi pegawai menurut golongan ini memperlihatkan bahwa Inspektorat memiliki basis pegawai yang kuat di tingkat menengah, namun masih perlu memperkuat jenjang senior (golongan IV) untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan keahlian strategis. Di sisi lain, jumlah pegawai di golongan awal (II) yang sangat terbatas juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kesenjangan regenerasi dalam jangka panjang.

2. Berdasarkan Pendidikan

Jika ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, pegawai Inspektorat Kab Seluma menunjukkan dominasi kuat pada lulusan Strata 1 (S1) yang berjumlah 74 orang. Jumlah ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan analisis, perencanaan, dan penyusunan kebijakan pembangunan. Keberadaan pegawai dengan kualifikasi S1 menjadi fondasi penting karena pada level ini mereka umumnya memiliki kemampuan konseptual yang memadai serta keterampilan teknis yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pengawasan.

Selain itu, terdapat 11 pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2). Hal ini merupakan modal besar karena pegawai dengan kualifikasi S2 umumnya memiliki spesialisasi tertentu, baik di bidang perencanaan, ekonomi, kebijakan publik, maupun disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan pembangunan daerah. Tingginya jumlah lulusan S2 mencerminkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih mendalam, yang sangat diperlukan dalam menghadapi kompleksitas isu pembangunan daerah, seperti integrasi perencanaan lintas sektor, analisis big data, maupun penyusunan dokumen strategis jangka panjang dan menengah.

Sementara itu, pegawai dengan kualifikasi Strata 3 (S3) tercatat sebanyak 1 orang. Walaupun jumlahnya masih sangat terbatas, keberadaan pegawai dengan pendidikan doktoral sangat berharga karena dapat menjadi motor penggerak dalam

menghasilkan inovasi kebijakan, riset mendalam, serta pengembangan metodologi perencanaan yang lebih ilmiah. Pegawai S3 juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengarahkan penelitian terapan dan memperkuat basis evidence-based policy di lingkungan

Untuk kategori pendidikan di bawah sarjana, jumlahnya cukup banyak. Tercatat terdapat 20 orang lulusan SLTA, 25 orang lulusan Diploma III (DIII). Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pegawai saat ini sangat didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi dan tenaga pendukung dengan pendidikan menengah dan diploma. Namun demikian, untuk efektivitas jangka panjang, dibutuhkan program pengembangan kapasitas seperti pendidikan lanjutan atau pelatihan agar kompetensi mereka dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mencerminkan bahwa Inspektorat Kab Seluma memiliki SDM yang relatif berkualitas tinggi dengan dominasi lulusan S1 dan D3. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peran pegawai dengan kualifikasi S2 dan S3 sebagai agen perubahan, sembari tetap memberikan ruang pembinaan bagi pegawai dengan pendidikan menengah dan diploma agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga.

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, Inspektorat Kabupaten Seluma memiliki jumlah pegawai yang relatif berimbang. Dari total 131 pegawai, terdapat 51 orang laki-laki dan 79 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan gender di lingkungan Inspektorat cukup baik, bahkan cenderung memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dominasi jumlah pegawai perempuan mencerminkan adanya pergeseran positif dalam struktur organisasi pemerintahan, di mana perempuan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga aktif dalam fungsi strategis seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian kebijakan publik. Fakta bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat perspektif gender dalam perencanaan dengan sesuai

pembangunan, prinsip pengarusutamaan gender (PUG) yang menjadi salah satu mandate nasional maupun internasional.

Sementara itu, keberadaan 51 pegawai laki-laki tetap menjadi komponen penting karena mereka juga mendominasi beberapa posisi teknis dan manajerial tertentu. Keseimbangan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan representatif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas. Namun demikian, meskipun proporsi gender relatif seimbang, tantangan yang perlu diperhatikan adalah pemerataan kesempatan karier antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan kuantitas tidak otomatis menjamin keseimbangan kualitas, terutama dalam hal penempatan jabatan fungsional maupun struktural. Oleh karena itu, pada periode Renstra berikutnya perlu dipastikan adanya kebijakan internal yang mendorong kesetaraan akses pengembangan karier, pelatihan, dan promosi jabatan bagi semua pegawai tanpa membedakan gender.

Dengan kondisi ini, Inspektorat Kabupaten Seluma memiliki peluang untuk menjadi contoh lembaga pemerintah daerah yang tidak hanya mendorong profesionalisme, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dalam tata kelola organisasinya.

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Berdasarkan jabatan fungsional tertentu (JFT) Komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Seluma juga dapat ditinjau dari sisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang melekat pada ASN. Data menunjukkan adanya variasi jabatan fungsional yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas teknis dan strategis Inspektorat . Pertama, pada Jabatan Fungsional Auditor, terdapat 16 orang Auditor Terampil, 16 orang Auditor Ahli.

Pertama, 13 orang Auditor Muda dan 2 orang Auditor Madya. Jumlah ini cukup signifikan, mengingat Inspektorat merupakan instansi yang memiliki mandat utama di bidang pengawasan daerah. Kehadiran auditor dalam berbagai jenjang menunjukkan adanya kesinambungan kapasitas mulai dari jenjang awal hingga menengah. Namun demikian, proporsi auditor madya yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan auditor muda menandakan perlunya strategi pengembangan karier agar semakin banyak ASN yang dapat

naik ke jenjang madya maupun utama. Hal ini penting agar kualitas auditor semakin terjamin melalui keberadaan auditor senior yang berpengalaman.

Kedua, untuk Jabatan PPUPD, terdapat 8 orang PPUPD Pertama, 4 orang PPUPD Muda dan 5 orang PPUPD Madya. Yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tugasnya meliputi reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan untuk memastikan ketaatan terhadap norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Ketiga, terdapat 4 orang pegawai Perencana Ahli Pertama, 12 orang Pranata Komputer Ahli Pertama, 3 orang Pranata Komputer Terampil dan 5 orang Arsiparis Ahli Pertama. Jabatan fungsional tertentu ini memainkan peran penting dalam menopang manajemen internal Inspektorat . Misalnya, Perencanaan dan Keuangan berperan dalam pengelolaan perencanaan dan evaluasi anggaran, Pranata Komputer mendukung transformasi digital melalui pengelolaan sistem informasi perencanaan, sedangkan Arsiparis bertugas menjaga tata kelola dokumen perencanaan yang menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, struktur JFT di Inspektorat Kabupaten Seluma sudah relatif lengkap, namun distribusi jenjang karier masih perlu ditingkatkan. Penekanan pada pengembangan perencana madya dan utama, peningkatan kapasitas peneliti ke jenjang lebih tinggi, serta penguatan peran JFT lainnya akan menjadi langkah strategis dalam memastikan Inspektorat mampu menjalankan mandat perencanaan, riset, dan inovasi secara profesional, modern, dan akuntabel.

**Tabel 2.2. 1 Kebutuhan dan Persediaan Pegawai Di Inspektorat
Daerah kabupaten Seluma Tahun 2025**

No	Nama Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana		Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
			(B)	(K)	(B-K)
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Seluma		1	1	0
2.	Sekretaris		1	1	0
Subbag. Perencanaan dan Keuangan					
3.	Kasubbag, Perencanaan dan Keuangan		1	1	0
	1	Pengelola Data dan Informasi	0	0	0
	2	Jf. Perencana Ahli Madya	0	0	0
	3	Jf. Pelaksana Umum	1	1	0
	4	Jf. Perencana Ahli Muda	0	0	0
	5	Jf. Komputer Terampil	0	0	0
	7	Jf. Perencana Ahli Pertama	4	4	0
	8	Jf. Pranata komputer Ahli Pertama	1	1	0
	9	Jf. Pranata komputer Terampil	2	2	0
Subbag. Administrasi Umum dan Kepegawaian					
4.	Kasubbag. Administrasi Umum dan Kepegawaian		1	1	0
	1	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0
	2	Pengelola Data dan Informasi	0	0	0
	3	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0
	4	Analisis Tata Usaha	1	1	0
	5	Jf. Arsiparis Ahli Pertama	3	3	0
	6	Jf. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	0	0
	7	Penata Layanan Operasional	0	0	0
	8	Penata Laksana Barang	3	3	0
	9	Jf. Pranata komputer Ahli Pertama	2	2	0
	10	Jf. Pranata komputer Terampil	1	1	0
Subbag. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					
5.	Kasubbag. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1	1	0
	1	Penelaah teknis kebijakan	1	1	0
	2	Pengelola data dan informasi	0	0	0
	3	Jf. Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	0	0
	4	Jf. Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	0	0
	5	Jf. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3	3	0
	6	Jf. Pranata komputer Ahli Pertama	3	3	0

	7	Jf. Pranata komputer Terampil	0	0	0
	8	Jf. Auditor Ahli Pertama	0	0	0
	9	Jf. PPUPD Pertama	0	0	0
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I		1	1	0
	1	Jf. Auditor Ahli Pertama	3	7	-4
	2	Jf. Auditor Ahli Muda	2	5	-3
	3	Jf. Auditor Ahli Madya	1	1	0
	4	Jf. Auditor Ahli Utama	0	0	0
	5	Jf. Auditor Terampil	3	1	+2
	6	Jf. Auditor Kepegawaian Pertama	0	0	0
	7	Jf. Auditor Kepegawaian Muda	0	0	0
	8	Jf. Auditor Kepegawaian Madya	0	0	0
	9	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	2	5	-3
	10	Pemerintah Daerah Pertama	0	0	0
	11	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	2	3	-1
	12	Pemerintah Daerah Muda	0	0	0
	13	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	2	-1
	14	Pemerintah Daerah Madya	0	0	0
	15	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
	16	Pemerintah Daerah Utama	0	0	0
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II		1	1	0
	1	Jf. Auditor Ahli Pertama	5	7	-2
	2	Jf. Auditor Ahli Muda	2	5	-3
	3	Jf. Auditor Ahli Madya	0	0	0
	4	Jf. Auditor Terampil	5	1	+4
	5	Jf. Auditor Ahli Utama	0	0	0
	6	Jf. Auditor Kepegawaian Pertama	0	0	0
	7	Jf. Auditor Kepegawaian Muda	0	0	0
	8	Jf. Auditor Kepegawaian Madya	0	0	0
	9	Jf Pengawas Penyelenggaraan Urusan	4	4	0
	10	Pemerintah Daerah Pertama	0	0	0
	11	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	3	-2
	12	Pemerintah Daerah Muda	0	0	0
	13	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	2	-1
	14	Pemerintah Daerah Madya	0	0	0
	15	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
	16	Pemerintah Daerah Utama	0	0	0
8.	Inspektur Pembantu Wilayah III		1	1	0
	1	Jf. Auditor Ahli Pertama	3	7	-4
	2	Jf. Auditor Ahli Muda	3	5	-2
	3	Jf. Auditor Ahli Madya	1	1	0
	4	Jf. Auditor Ahli Utama	0	0	0

	5	Jf. Auditor Terampil	3	1	+2
	6	Jf. Auditor Kepegawaian Pertama	0	0	0
	7	Jf. Auditor Kepegawaian Muda	0	0	0
	8	Jf. Auditor Kepegawaian Madya	0	0	0
	9	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	4	-3
	10	Pemerintah Daerah Pertama	0	0	0
	11	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	2	3	-1
	12	Pemerintah Daerah Muda	0	0	0
	13	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	2	-1
	14	Pemerintah Daerah Madya	0	0	0
	15	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
	16	Pemerintah Daerah Utama	0	0	0
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV		1	1	0
	1	Jf. Auditor Ahli Pertama	2	7	-5
	2	Jf. Auditor Ahli Muda	2	5	-3
	3	Jf. Auditor Terampil	3	1	+2
	4	Jf. Auditor Ahli Utama	0	0	0
	5	Jf. Auditor Kepegawaian Pertama	0	0	0
	6	Jf. Auditor Kepegawaian Muda	0	0	0
	7	Jf. Auditor Kepegawaian Madya	0	0	0
	8	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	4	-3
	9	Pemerintah Daerah Pertama	0	0	0
	10	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	3	-2
	11	Pemerintah Daerah Muda	0	0	0
	12	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	1	2	-1
	13	Pemerintah Daerah Madya	0	0	0
	14	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
	15	Pemerintah Daerah Utama	0	0	0
10.	Inspektur Pembantu Wilayah V		1	1	0
	1	Jf. Auditor Ahli Pertama	3	7	-4
	2	Jf. Auditor Ahli Muda	5	5	0
	3	Jf. Auditor Ahli Madya	0	0	0
	4	Jf. Auditor Ahli Terampil	2	1	+1
	5	Jf. Auditor Ahli Utama	0	0	0
	6	Jf. Auditor Kepegawaian Pertama	0	0	0
	7	Jf. Auditor Kepegawaian Muda	0	0	0
	8	Jf. Auditor Kepegawaian Madya	0	0	0
	9	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
	10	Pemerintah Daerah Pertama	0	0	0
	11	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
	12	Pemerintah Daerah Muda	0	0	0
	13	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0

14	Pemerintah Daerah Madya	0	0	0
15	Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan	0	0	0
16	Pemerintah Daerah Utama	0	0	0
JUMLAH		101	139	-38

Dari tabel diatas, dapat disampaikan masih banyak kebutuhan pegawai terutama teknis yang belum terpenuhi berdasarkan kebutuhannya. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juha harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.